

## BAB VI

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang yang berbeda dengan Kebijakan pada penjajah sebelumnya, jiwa nasionalisme yang diciptakan Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia, kebijakan pendidikan yang mendapat pengaruh kemiliteran Jepang untuk mendukung Perang Pasifik. Hingga kebijakan pendidikan ini masih ada yang diterapkan beberapa oleh Indonesia setelah Kemerdekaan Indonesia. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada sumber sekunder, berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang. Sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), serta buku-buku relevan lain yang peneliti peroleh. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan menggunakan metode naratif deskriptif dengan mempertimbangkan aspek kronologi sejarah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang bertujuan untuk mengambil hati Indonesia dan menghapuskan bekas-bekas penjajahan sebelumnya. Setelah Jepang berhasil menyerang Armada

Amerika di Pearl Harbour, Hawaii. Jepang mendaratkan pasukannya ke Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah Palembang jatuh ke tangan Jepang, terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang pada awal bulan Maret 1942. Kedatangan Jepang memberikan kesan yang mendalam bagi Indonesia yang menganggap bahwa kekuasaan Belanda tidak dapat diruntuhkan dan didukung dengan ramalan *Joyoboyo* yang berisi bahwa akhir penjajahan oleh bangsa kulit putih di tangan penyerbu kulit kuning dari utara menjelang kebebasan Indonesia.

Demi mendapatkan hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai kebijakan di bidang politik yaitu melarang kegiatan berkumpul dan rapat, stratifikasi sosial dimana Jepang berada di posisi teratas disusul oleh Timur Asing dan Indonesia pada lapisan kedua dan Belanda serta Eropa pada lapisan ketiga. Dikeluarkannya juga kebijakan mengenai produksi perkebunan, rehabilitasi dan pemberian kredit.

Bidang ekonomi yaitu Untuk mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain

1. Pengambilan Aset-Aset Pemerintah Hindia Belanda

Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.

2. Kontrol terhadap Perkebunan dan Pertanian Rakyat

Tidak semua tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan kepentingan perang. Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, seperti karet dan kina, serta Jarak. Kopi, teh, dan tembakau hanya dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna bagi keperluan perang sehingga perkebunan ketiga tanaman tersebut banyak digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak yang berguna sebagai pelumas mesin pesawat tentara Jepang.

### 3. Kebijakan Moneter dan Perdagangan

Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku, tetap menggunakan gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar harga barang-barang tetap dapat dipertahankan seperti sebelum terjadinya perang.

Perdagangan pada umumnya lumpuh dikarenakan menipisnya persediaan barang-barang di pasaran. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur yang ditunjuk agar dapat dilakukan pengendalian harga.

### 4. Sistem Ekonomi Perang

Dalam situasi perang, setiap daerah harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, tanpa mengandalkan bantuan dari daerah lain. Setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi

kebutuhan pokok sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang.

Demi melancarkan usaha Nipponisasi-Nya, Jepang melakukan berbagai kebijakan di bidang pendidikan yaitu

1. Penggunaan Bahasa

Pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam komunikasi lisan dan tulisan, hanya memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang.

2. Menghilangkan budaya barat

Pendudukan Jepang membubarkan dan menutup seluruh sekolah yang dibangun dengan system pendidikan Belanda dan menggantikan dengan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan Jepang.

3. Perubahan Jenis Sekolah

Untuk sekolah dasar hanya ada Sekolah Rakyat, dibuka untuk semua golongan penduduk tanpa ada diskriminasi sosial. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama, merupakan lanjutan dari Sekolah Rakyat. Sekolah Menengah Tinggi, merupakan lulusan dari sekolah menengah pertama negeri. Dibentuknya pelatihan guru.

4. Masa Pendidikan

Sekolah Rakyat dengan masa pendidikan selama 6 tahun, setara dengan *volks school* pada zaman Belanda. Sekolah menengah pertama dengan masa pendidikannya 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi dengan masa pendidikan selama 3 tahun.

5. Isi Pengajaran

Untuk sekolah rakyat, Pengajaran bahasa Jepang yang ditanamkan di Sekolah Rakyat bertujuan untuk memahami kehidupan, semangat, dan kebudayaan Jepang. Dalam menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, sekolah

diterapkan beberapa jam perminggu khusus untuk bahasa Jepang seperti kelas 1 selama 3 jam, kelas 2 selama 4 jam, kelas 3 selama 5 jam, dan kelas 4-6 selama 6 jam. Sekolah Menengah Pertama, diterapkan beberapa jam perminggu khusus untuk bahasa Jepang seperti siswa dalam waktu 7 jam, dan siswi dalam waktu 6 jam. Dan Pelatihan Guru, tentang mental ideology mengenai *Hakko Ichi-U* dalam rangka Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, Latihan kemiliteran dan semangat Jepang (*Nippon Seisyin*), Bahasa dan sejarah Jepang dengan adat istiadatnya, Ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitics, olahraga, lagu-lagu dan nyanyian Jepang berlangsung selama 3 bulan

